

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DALAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN  
ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT**

Chandra Wira Hadi Santika

NPP. 29.0637

*Asdaf Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [Chndrawira@gmail.com](mailto:Chndrawira@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Community organizations and NGOs as a form and forum for people's aspirations are born because of the similarity of opinions in people who have the same views and goals. Because of the large number of community organizations that are born in the community, resulting in the existence of community organizations that are contrary to Pancasila. This can result in violations committed by CSOs and NGOs. Therefore, it is necessary to have guidance and control from the National Development Agency **Objectives:** to examine the role of the Cimahi City National Unity Agency in fostering community organizations and non-governmental organizations in Cimahi City and the causal factors found violations by CSOs and NGOs. **Methods:** descriptive method with inductive approach. In data collection, the authors used interview, observation and documentation techniques. Meanwhile, in analyzing the data, the author uses qualitative analysis techniques **Results / Findings:** It is recommended that the government in this case the Kesbang Agency must carry out its role well as a coach and control for CSOs and NGOs **Conclusion:** The Cimahi City Kesbang Agency in carrying out guidance and control of Community Organizations and Non-Governmental Organizations has worked optimally, with factors causing violations committed by Community Organizations and Non-Governmental Organizations in Cimahi City include: regional competition, differences of views, situational conditions, organizational conditions, and unmet demands to the government.

**Keywords :** Community organization, coaching, discipline

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Organisasi masyarakat dan LSM sebagai bentuk dan wadah bagi aspirasi masyarakat lahir karena adanya persamaan pendapat pada masyarakat yang memiliki pandangan dan tujuan yang sama. Karena banyaknya Organisasi masyarakat yang lahir pada masyarakat, mengakibatkan adanya Organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas dan LSM. Oleh sebab itu diperlukan adanya pembinaan dan penertiban dari Badan Kesbang **Tujuan:** untuk mengkaji peran Badan Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dalam melakukan pembinaan terhadap Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi dan faktor-faktor penyebab ditemukan pelanggaran oleh Ormas dan LSM. **Metode:** metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif **Hasil/Temuan:** Disarankan pemerintah dalam hal ini Badan Kesbang harus menjalankan perannya dengan baik sebagai pembina dan penertiban bagi Ormas dan LSM **Kesimpulan:** Badan Kesbang Kota Cimahi dalam melakukan pembinaan dan penertiban terhadap Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat telah bekerja dengan optimal, dengan faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan Oleh Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi antara lain: persaingan wilayah, perbedaan pandangan, kondisi situasional, kondisi keorganisasian, serta tuntutan kepada pemerintah yang tidak terpenuhi.

**Kata kunci : Organisasi masyarakat, pembinaan, penertiban**

## 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Organisasi masyarakat sejatinya dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pembangunan bangsa yang berasaskan Pancasila. Beragam Organisasi masyarakat lahir karena adanya persamaan pendapat pada masyarakat yang memiliki pandangan dan tujuan yang sama. Karena banyaknya Organisasi masyarakat yang lahir pada masyarakat, mengakibatkan adanya Organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila. Disini pentingnya peran dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Organisasi masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan berorganisasi yang tertib. Pembinaan yang dilakukan Kesbang sangatlah penting mengingat Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat seringkali mendapat stigma negatif dari masyarakat. Berdasarkan data Kesbang Kota Cimahi, ada 387 Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Tapi tidak semuanya aktif beraktifitas dan melaporkan kegiatan kepada Kesbang. Kesbang Kota Cimahi telah melakukan pembinaan dengan berbagai pola, diantaranya menggunakan pola persuasif, preventif, dan edukatif. Dari berbagai pola itu ada berbagai kegiatan yang kerap dilakukan, antara lain seperti kegiatan sosialisasi, kegiatan dialogis melalui Forum Group Discussion (FGD), serta kegiatan self assesment seperti Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK).

### 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa tidak sepenuhnya mampu menertiban Organisasi masyarakat yang ada di Kota Cimahi, masih terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Beberapa kasus yang terjadi di Kota Cimahi antara lain, Adanya premanisme berkedok Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi masyarakat menjadi kasus yang paling disorot publik belakangan ini. Adanya dua Organisasi masyarakat yang berselisih antara Organisasi masyarakat XTC dan Brigez yang terjadi di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yang mengakibatkan satu orang tewas. XTC dan Brigez adalah salah satu Organisasi masyarakat besar yang merupakan bekas gank motor yang mendaftarkan diri sebagai Organisasi masyarakat. permasalahan yang terjadi pada Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi adalah masih adanya Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengganggu ketertiban pada masyarakat Kota Cimahi. Pentingnya peran dari Pemerintah Kota Cimahi

memalui Kesbang Kota Cimahi sebagai upaya pembinaan dan penertiban Organisasi masyarakat di Kota Cimahi.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian sebelumnya merupakan karya tulis ilmiah yang sudah dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan acuan dan referensi serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian pertama oleh Yasti Efyanti (2018) untuk menjaga kestabilan politik di bidang sosial politik, KESBANG LINMAS Kota Sungai Penuh melakukan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakatan yang ada, pembinaan tersebut dilakukan dengan pelatihan-pelatihan dibidang sosial politik. Penelitian kedua oleh Magfirah Maasum (2018) Bentuk pengaturan organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia cukup menunjukkan keinginan pemerintah untuk mengakomodasi kebebasan berserikat dan berkumpul warga negara seluas-luasnya, dan sanksi terhadap kelompok masyarakat di Indonesia yang melanggar Pancasila didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun, karena maraknya Organisasi Masyarakat radikal dan Organisasi Masyarakat anti Pancasila, masih perlu ada kemajuan dalam penegakan sanksi. Penelitian ketiga oleh I Gusti Ayu Ratih Charisma Dewi Atmika, M. Adnan Madjid, Ichsan Malik (2018) BaKesbang Provinsi DKI Jakarta memiliki peran dalam hal pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Masyarakat melalui program-programnya yang bernuansa sosialisasi dan edukasi, serta upaya penanganan konflik antara Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dan FBR yang meliputi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaannya dirasa belum optimal karena tidak tepat sasaran. Sehingga pemerintah harus mereformulasikan program pembinaan Organisasi Masyarakat hingga pemantauan dan penanganan konflik dengan menambahkan subjek sasaran, yaitu level akar rumput.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada lokus dimana penulis melakukan penelitian di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, selain itu perbedaan juga terletak pada teori yang digunakan oleh penulis. Ketiga peneliti sebelumnya menggunakan metode yudiris normatif dan kualitatif deskriptif sedangkan penulis juga menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Teori Peran Soerjono Soekanto, penulisi akan mencoba lebih mendetail pada bagaimana peran badan kesatuan bangsa dalam pembinaan dan penertiban organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat di Kota Cimahi.

### **1.5 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Badan Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dalam melakukan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi dan mengkaji factor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi

## **II. METODE**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Untuk mendapatkan hasil yang baik peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 14 informan, antara lain Kepala Badan Kesbang, 3 orang Ketua Organisasi masyarakat dan Lembaga badan Kesbang Kota Cimahi, Kepala seksi hubungan antar Lembaga, 3 orang anggota organisasi masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat terkait dan 5 masyarakat Kota Cimahi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peran Badan Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dalam melakukan pembinaan terhadap Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi**

Melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan merujuk pada teori yang digunakan oleh penulis sebelumnya, maka penulis berusaha untuk membandingkan antara hasil analisis dengan informasi serta keadaan yang ada di lapangan. Teori peran yang dikemukakan Soerjono Soekanto (2002) bahwa Peran adalah komponen dinamis dari kedudukan (status), dan seseorang menjalankan peran ketika ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Pelaksanaan peran fungsi Kesbang terhadap Ormas dan LSM di Kota Cimahi berdasarkan visi dan misi Badan Kesbang Kota Cimahi yang mengacu pada visi dan misi pemerintah Kota Cimahi yaitu terwujudnya Kota Cimahi yang maju, agamis, dan berbudaya, dengan salah satu misi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul. Dengan adanya visi misi dari Kesbang membuat Ormas dan LSM harus memiliki visi misi yang sesuai dengan visi misi Kesbang Kota Cimahi.

##### **3.1.1 Norma**

###### **3.1.1.1 Pelaksanaan fungsi Pembinaan Kesbang terhadap Ormas dan LSM**

Berdasarkan visi dan misi yang dibuat oleh badan Kesbang salah satu strategi pembinaan yaitu dengan melakukan kegiatan bersama antara Kesbang, Ormas, dan LSM untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan visi misi Kesbang dan pengawasan dilakukan dengan cara Ormas dan LSM wajib membuat laporan rutin tentang kegiatan setiap (6) enam bulan sekali dan selambat lambatnya setahun sekali. Pelanggaran oleh ormas dan LSM akan minim terjadi apabila visi misi dapat terlaksanakan dengan baik.

###### **3.1.1.2 Pelaksanaan fungsi Ormas dan LSM**

Upaya pembinaan dan penertiban Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat oleh Badan Kesbang salah satunya adalah dengan menjalankan program-program tahunan yang menjadi prioritas. Penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah contohnya yang merupakan salah satu peran penting yang dilakukan oleh Badan Kesbang dalam pembinaan Ormas. Selain itu verifikasi data ormas dan LSM yang rutin dilakukan 6 (enam) bulan atau setahun sekali merupakan bentuk realisasi pelaksanaan program tersebut. Sejak tahun 2020 banyak program terus berjalan dengan baik meskipun di tengah masa pandemi covid-19. Konsistensi Badan Kesbang dalam menjalankan program juga dibantu dengan koordinasi yang baik antara Badan Kesbang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat Kota Cimahi sendiri. Penyusunan strategi oleh Badan Kesbang penulis rasa sudah tepat, hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi yang sangat jarang terlibat dalam konflik juga dari hampir tidak adanya laporan masyarakat yang terkait dengan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya masyarakat yang meresahkan.

##### **3.1.2 Konsep Perilaku**

###### **3.1.2.1 Ormas dan LSM sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat**

Badan Kesbang menekankan bahwa Ormas dan LSM yang ada di Kota Cimahi menjadi wadah untuk masyarakat dalam berorganisasi dan juga sebagai pelaksana pengawasan kepada pemerintah. Sebagai wadah bagi masyarakat untuk berorganisasi, Ormas harus bisa menampung dan menyalurkan segala aspirasi anggotanya yang ditunjukkan kepada pemerintah. Pelaksanaan di lapangan, setiap Ormas dan LSM yang akan mengajukan tuntutan atau aspirasi kepada pemerintah haruslah dengan seijin Kesbang. Setiap hal yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi atau tuntutan masyarakat, terlebih yang berasal dari Ormas dan LSM,

harus dengan ijin dari Kesbang. Peran Kesbang sebagai lembaga yang membina Ormas sangat berperan karena perijinan dalam setiap kegiatan Ormas harus melalui Badan Kesbang.

### **3.1.2.2 Kesbang sebagai acuan bagi Ormas dan LSM**

Setiap Ormas dan LSM harus mendapatkan ijin dari Badan Kesbang dalam setiap menjalankan kegiatannya. Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormas dan LSM harus melalui ijin dari Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terlebih dahulu. Struktur organisasi dari Badan Kesbang yang merupakan sebuah instansi pemerintahan harus memiliki uraian tugas yang dijabarkan dengan detail.

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa (KESBANG) Kota Cimahi didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 13 (tiga belas) pegawai. Adapun jumlah total pegawai terdiri dari 13 ASN dan 3 (tiga) tenaga honorarium lepas, terdiri dari Golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III sebanyak 7 (tujuh) orang dan Golongan II sebanyak 4 (empat) orang serta tenaga harian lepas (THL) sebanyak 3 (tiga) orang. Kemudian pegawai Badan Kesatuan Bangsa (KESBANG) Kota Cimahi berdasarkan jenjang pendidikannya terdiri dari 2 (dua) orang Pascasarjana, 7 (tujuh) orang Sarjana, 1 (satu) orang pendidikan Diploma dan 4 (empat) orang setingkat SLTA.

Semenjak penyesuaian Nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa (KESBANG) Kota Cimahi ditetapkan, terdapat beberapa posisi jabatan yang masih kosong, yaitu 1 (satu) orang Kepala Badan dan saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, dan 3 (tiga) orang Kepala Seksi, sehingga total kekosongan jabatan sebanyak 7 (tujuh) orang, dan seiring penyesuaian Nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa (KESBANG) menambah pula komposisi kebutuhan atas pegawai/personil sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANG) Kota Cimahi dengan adanya kekurangan pegawai di beberapa bidang termasuk yang berkaitan dengan pembinaan dan penertiban Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhitung tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pemanfaatan jumlah pegawai yang ada dengan maksimal disertai dengan kemampuan dan kualitas dari pegawai itu sendiri menjadi faktor pendukung tertib dan terbinanya Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Cimahi.

Proses pembinaan dan penertiban Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dilakukan oleh Badan Kesbang Kota Cimahi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bidang-bidang pada badan memiliki pembagian tugas dan beban kerja tersendiri. Dalam pelaksanaannya, antara pembagian tugas dan beban kerjanya harus seimbang. Kesbang sebagai acuan bagi Ormas dan LSM dalam penyampaian aspirasi bagi masyarakat cukup dapat mengoptimalkan perannya karena dalam pembagian tugas bagi pegawai Kesbang dalam pembinaan bagi Ormas dapat terlaksana dengan baik

### **3.1.3 Perilaku individu**

#### **3.1.3.1 Tingkat kinerja anggota Ormas dan LSM**

Ormas dan LSM sejatinya adalah wadah bagi masyarakat berkumpul dan berorganisasi yang memiliki tujuan yang sama. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu diketahui bagaimana tingkat kinerja dari anggota Ormas dan LSM untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Kota Cimahi. Indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan-an/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, realisasi kinerja pada tahun 2019 adalah, dilakukannya pembinaan keormasan dalam bentuk kegiatan latihan dasar kepemimpinan (LDK) dengan sasaran 50 organisasi kemasyarakatan, jambore wawasan kebangsaan dengan sasaran 50 ormas, seminar wawasan kebangsaan dengan sasaran 100 ormas, pelibatan peran serta ormas didalam pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional sebanyak 20 ormas, maupun fasilitasi kegiatan-kegiatan keormasan pada tahun 2019 dilaksanakan kepada sebanyak 25 organisasi kemasyarakatan dari target 45 Ormas, dan didapat

capaian sebesar 92%. Adapun rasio capaian jumlah organisasi kemasyarakatan yang mengajukan pencatatan organisasi kemasyarakatannya pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dari tahun ke tahun cenderung ada pada setiap tahun dalam kurun tahun 2019-2022 ada sekitar 47 organisasi kemasyarakatan yang mengajukan pencatatan di Badan Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, aktifitas berkegiatan organisasi kemasyarakatan ataupun kelompok masyarakat ini menjadi tolak ukur tingkat kinerja dari anggota Ormas dan LSM, dimana selain diperlukan adanya pembinaan dan Kesbang juga diperlukan kerjasama yang baik antar anggota Ormas dan LSM terkait, selain itu juga tidak terlepas dari kinerja Badan Kesatuan Bangsa itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan dan fasilitasi dengan menjalin serta membangun komunikasi aktif yang kontinu dan berkesinambungan dengan organisasi kemasyarakatan ataupun kelompok masyarakat di wilayah Kota Cimahi. tingkat kinerja anggota Ormas dan LSM dapat dikatakan cukup baik. Peran Kesbang sebagai Badan pembina dan penertib Ormas dan LSM berjalan dengan baik karena adanya kerjasama dan juga komunikasi yang sangat baik antara Badan Kesbang dan Ormas LSM yang ada di Kota Cimahi. Pelanggaran yang diakibatkan oleh ormas LSM sangatlah minim karena kerjasama yang terjalin antara Badan Kesbang dan Ormas LSM di Kota Cimahi.

### **3.2 Diskusi temuan utama penelitian**

Pada penelitian pertama oleh Yasni Efyanti tentang peran Kesbang dan Linmas dalam pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Masyarakat di Kota Sungai Penuh dengan hasil penelitian Pembinaan dibidang penyelenggaraan dalam pelaksanaan pemilihan umum dilakukan kepada pengurus organisasi sosial politik dengan cara melakukan pertemuan berskala dua kali setahun kepada pengurus organisasi sosial politik, membantu menghadapi pemilihan umum, membantu mengadakan fasilitas operasional dan membantu memecahkan persoalan yang dihadapi organisasi tersebut. Pada penelitian ini fokusnya kepada peran Kesbangpol Kota Cimahi dalam melakukan pembinaan kepada Ormas dan LSM karena terjadi pelanggaran yang melibatkan Ormas dan LSM di Kota Cimahi. Pada penelitian kedua oleh Magfirah Maasum tentang penerapan sanksi terhadap Ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pada penelitian ini Badan Kesbangpol Kota Cimahi belum menerapkan sanksi kepada Ormas dan LSM yang melanggar, tetapi melakukan pembinaan secara persuasif dilihat dari norma, perilaku, dan perilaku individu dari masing-masing. Pada penelitian ketiga oleh I Gusti Ayu Ratih Charisma Dewi Atmika, M. Adnan Madjid, Ichsan Malik tentang peran Pemerintah DKI Jakarta dalam penanganan konflik antara Ormas, Pemerintah DKI Jakarta belum optimal sehingga dilakukan formulasi pembinaan lagi. Pada penelitian ini hanya berfokus pada peran Kesbangpol dalam melakukan pembinaan kepada Ormas dan LSM di Kota Cimahi yang di nilai mengganggu ketertiban masyarakat.

## **IV. KESIMPULAN**

Badan Kesbang Kota Cimahi dalam melakukan pembinaan dan penertiban terhadap Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat telah bekerja dengan optimal. Komunikasi dan juga pendekatan yang dilakukan antara Badan Kesbang dengan Ormas dan LSM menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembinaan dan penertiban Ormas dan LSM yang ada di Kota Cimahi. Pembagian tugas dari setiap pegawai Badan Kesbang di bidang Ormas dan LSM sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari sedikitnya pelanggaran yang dilakukan Ormas dan LSM di Kota Cimahi menandakan keberhasilan Badan Kesbang Kota Cimahi menjalankan perannya dalam pembinaan dan penertiban Ormas dan LSM di Kota Cimahi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work)** Penelitian ini bisa menjadi acuan Badan Kesbangpol Kota Cimahi dalam melakukan pembinaan secara terus menerus kepada Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat ketika terjadi perselisihan antara keduanya maupun dalam mengganggu ketertiban masyarakat.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama untuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dan seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah memberi kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Atmika, G. A., Madjid, M., & Malik, I. 2018. *Peran Pemerintah Daerah Provinsi Dki Jakarta Dalam Penanganan Konflik Antara Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Dan Forum Betawi Rempug Di Jakarta Tahun 2016-2018*. jurnal Program Studi Universitas Pertahanan.

Efyanti, Y. (2018). *Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan*. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(02), 65-79

Maasum, M. 2017. *Penerapan sanksi terhadap Organisasi Masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ditinjau dari undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat*. *Lex Crimen* Vol. VI/No. 5/Jul/2017.

Sumarni. 2015. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi Di Kota Samarinda*. *Jurnal Sosiologi*, Vol 3, No 2.

<https://dispmd.bulelengkab.go.id/info/organisasi-masyarakat/detail/artikel/pengertian-lembaga-swadaya-masyarakat-13>. *Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat*. Retrieved from Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sabtu, 18 September 2021.

<https://kesbanglinmas.klungkungkab.go.id/2016/11/01/pemberdayaan-organisasi-masyarakat-menghadapi-perkembangan-dunia-global/>. *Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Hadapi Perkembangan Dunia Global*. Retrieved from Kementerian Dalam Negeri. Sabtu, 18